

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kontijensi

Teori Kontijensi merupakan teori perilaku yang menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk merancang sebuah organisasi. Cara terbaik untuk mengatur dan sebuah perusahaan atau organisasi itu semua bergantung bagaimana situasi internal dan eksternal perusahaan. Teori kontijenti mengklaim beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi dan dapat menghasilkan perilaku yang berbeda (Luthans dan Stewart, 1977) dalam (Gasperz, 2019).

Implementasi teori kontijensi dalam sistem informasi akuntansi sangat berkorelasi dengan pengaruh teknologi, dampak lingkungan dan dampak struktur organisasi. Struktur organisasi mencakup sumber daya manusia. Kemampuan teknologi organisasi mengacu pada prosedur teknis dalam organisasi termasuk lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi yang digunakan oleh organisasi dan dan pelaksanaannya berdampak pada praktik dan operasi organisasi, seperti: pelatihan dan keahlian sumber daya manusia organisasi (Fernandez-Robin, Celemin-Pedroche, Santander-Astorga, & Alonso-Almeida, 2019). Teori kontijensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila sumber daya manusia yang ada mampu memecahkan situasi tertentu yang yadang terjadi, dan mampu menganalisis setiap situasi, termasuk dalam menyusun laporan keuangan terutama dalam akuntansi sektor publik.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh disiplin ilmu akuntansi sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan diperlukan orang-orang yang berkompeten. Laporan keuangan adalah salah satu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang

digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Suteja, 2018).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Tujuan umum dari laporan keuangan yaitu untuk kepentingan umum, berupa penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari entitas, yang berguna dalam memberikan keputusan ekonomis untuk para pengguna. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, serta sarana evaluasi kinerja.

Adapun komponen laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran (*budgetary reports*);
2. Laporan finansial;
3. Catatanatas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan pemerintah daerah dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:

1. Semester, yang mencakup periode Januari-Juni;
2. Tahunan, yang mencakup periode Januari-Desember.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar kesesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Susilawati et al., 2014). Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang

berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut disusun dengan baik, benar sesuai dengan prinsip akuntansi juga dapat dipahami oleh pemakai informasi.

Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat disebabkan oleh kapasitas kompetensi pengelolaan keuangan yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, namun bagaimana pencatatan transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada (Yosefrinaldi, 2016).

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Rahayu, 2017).

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, atau yang selanjutnya disingkat sebagai SAP, merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Demikian maka SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

1. Relevan

Informasi dapat dikatakan relevan jika informasi yang terkandung didalamnya dapat bermanfaat bagi pengguna untuk membuat keputusan dengan membantu mereka dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang, dan memprediksi masa depan, serta dengan mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pengguna laporan keuangan. Informasi dapat dinyatakan relevan apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat untuk mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu (*timeliness*)

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Laporan keuangan harus memuat informasi yang terbebas dari asumsi yang salah dan kesakahan material, menyajikan informasi secara jujur dan memungkinkan untuk dilakukan verifikasi, sehingga informasi yang relevan saja tidak cukup karena belum tentu dapat diandalkan. Suatu informasi dapat dikatakan andal apabila:

a. Dapat diuji kebenarannya (*verifiable*)

Kemampuan informasi untuk diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda, tetapi dengan menggunakan metode yang sama, akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

b. Netral

Dalam penyajian laporan keuangan tidak ada unsur bias atau informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

c. Pengajian secara wajar/jujur (*representational faithfulness*)

Penyajian laporan keuangan menggambarkan keadaan secara wajar dan lengkap menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut, dan informasinya juga harus bebas dari unsur bias.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang tercantum dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain secara umum.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah seperangkat tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan tertentu yang menjadi syarat utama dan elemen utama bagi lahirnya kepemimpinan yang efektif dan efisien (Siagian, 1997). Selain itu (Hutapea dan Thoha, 2008) juga mengungkapkan definisi kompetensi, yaitu sebagai kapasitas ada pada seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan

Sedangkan menurut *International Federation of Accountants* (2014:11) dalam *IAESB Handbook of International Education Pronouncements* menyatakan bahwa “*Competence is defined as the ability to perform a work role to a defined standard with reference to working environments. To demonstrate competence in a role, a*

professional accountant must possess the necessary (a) professional knowledge, (b) professional skill, and (c) professional values, ethics, and attitudes.” Yang mana artinya “Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai perannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap profesional.”

Kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang (Rosanti, 2017). Secara umum kompetensi dipahami sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behaviour*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaan. Kompetensi Sumber Daya Manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Kapasitas pada sumber daya manusia yang ada harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Kompetensi Sumber Daya Manusia melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif (Wirawan, 2009).

2.4.1 Komponen Sumber Daya Manusia

Hutapea dan Thoha (2008) mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi, antara lain:

1. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang yang digelutinya.

Ilmu atau informasi yang dimiliki seorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai juga turut menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.

2. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.
3. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku perilaku pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

2.5 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian ketentuan yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 21 tahun 2011).

Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota dan provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Keuangan Daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang,

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terkandung didalamnya maka setiap kepala daerah diharuskan untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam Permendagri No. 77 tahun 2020.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga politik. Hal ini terjadi disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Herawati, 2017).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Dalam implementasi pengelola keuangan daerah diharapkan para pengelola perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat menyajikan laporan keuangan yang andal. Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian.

2.6 Pengendalian Intern

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait”. Pengendalian intern pemerintah dirancang dengan

pedoman pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang mana dijelaskan bahwa SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menunjuk aparat pengawasan intern pemerintah untuk melaksanakan evaluasi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantu pada Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan (PP No. 8 Tahun 2016 Pasal 4).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang dijalankan secara luas dalam lingkungan pemerintah pusat dan daerah (Nilam Sari, 2016). Pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 pasal 3-46, pengendalian intern terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian, adalah dasar dari seluruh komponen pengendalian intern yang menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penilaian resiko, yaitu identifikasi dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk sebuah landasan untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan suatu prosedur dan kebijakan yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi merupakan suatu situasi dimana kepala instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
5. Pemantauan pengendalian intern yang secara terus-menerus dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan, sehingga pencapaian tujuan bisa ditemukann secara jelas. Dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang paling umum terjadi ialah korupsi, kesalahan administrasi, serta pengellolaan keuangan yang tidak berjalan dengan baik (Triyani, 2017).

Dalam pengendalian intern terdapat proses, prosedur, serta kebijakan yang disusun oleh pemerintah untuk memastikan pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, serta handal adanya. Oleh karena itu laporan keuangan bukan hanya *output* dari sebuah proses pelaporan keuangan, namun laporan keuangan dapat dikatakan sebagai representasi kinerja manajemen publik selama tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

2.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan pemerintah dapat terbantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang handal, relevan, kompeten, tepat waktu, serta informasi yang disajikan dapat menjadi dasar atau landasan untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi yang semakin maju dengan pesat dan jangkauannya yang semakin luas, dapat mempermudah bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, serta menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Saat ini pemerintah pusat maupun daerah, diwajibkan agar dapat mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendorong dan mendukung penyampaian informasi yang cepat, tepat, dan akurat.

2.8 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai Kompetensi SDM, penerapannya SAKD, pengendalian intern, dan penggunaan teknologi komputer terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

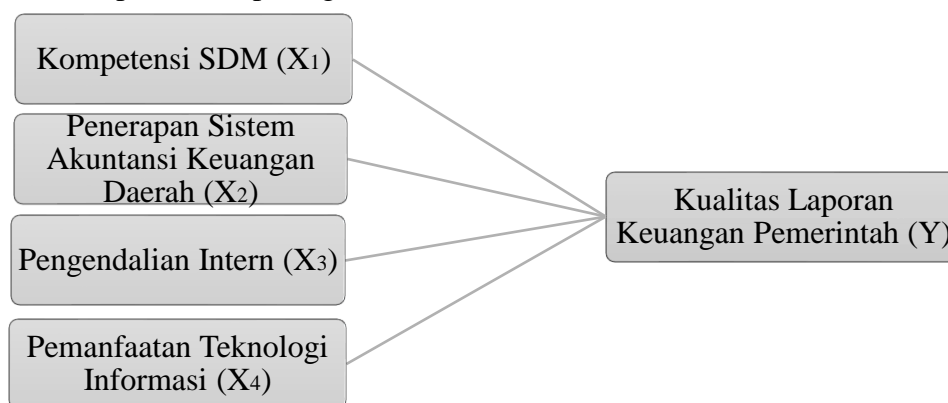
No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Putriiasri Pujanira, Abdullah Taman (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. 2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. 3. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY. 4. Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
2	Abdul Aziiz Ramadhani (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetisi Staf Terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas

		Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Kompetisi staf tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3	Khoirina Kencana Ningrum (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
4	Arisa Ariani (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. 5. Secara bersama-sama (simultan) variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern (X) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5	Heni Sundari, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., CA (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Bandung termasuk dalam kategori sangat baik dengan masing-masing skor rata-rata sebesar 86%, 85%, dan 86%.
---	--	--	--

2.9 Kerangka Pemikiran

Secara sistematis, kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan yang dapat dipengaruhi oleh kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern, dan juga pemanfaatan teknologi informasi.

2.10 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja setiap pegawai dalam organisasi maupun sebuah instansi. Setiap pegawai harus memiliki pengetahuan yang cukup, keterampilan khusus, dan

sikap yang baik dalam melaksanakan tugas yang sudah diberikan kepadanya untuk meningkatkan kualitas kinerja seorang pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagusnya suatu kompetensi sumber daya manusia yang ada dalam sebuah institusi, maka kualitas informasi laporan keuangan juga semakin bagus.

Pemerintah yang memiliki SDM dengan kompetensi yang baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna. Sebaliknya jika SDM tidak memiliki kompetensi di bidang akuntansi maka pelaksanaan dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dibuat hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H₁: Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2.10.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dengan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Menurut (Ramadhani, 2018) pada penelitiannya menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Jika Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sudah diterapkan dengan baik oleh OPD kota Bandar Lampung, maka Kualitas Laporan Keuangan pun sudah semakin baik.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2.10.3 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitiannya (Khoirina, 2018) mengatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Walaupun sistem pengendalian intern yang telah diterapkan sudah bagus, tetapi pemerintah daerah belum menetapkan sistem pengendalian intern secara efektif.

Sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga asset suatu entitas dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Keakuratan data akuntansi dapat menghasilkan laporan keuangan berkualitas dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dibuat hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2.10.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat serta pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola informasi keuangan daerah secara cepat, tepat, dan akurat.

Teknologi informasi berkembang pesat dan kita sudah merasakan efeknya, seperti mudahnya mendapatkan informasi melalui telepon genggam, komputer, dengan menggunakan jaringan internet. Teknologi informasi merupakan perpaduan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi (Karyadi, 2019). Perkembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi dapat berpotensi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan pemerintah kepada pelayanan publik.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat dibuat hipotesis pada penelitian ini adalah:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.